



LAPORAN

PENGELOLAAN RISIKO

TRIWULAN I TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-Mail : dpmtsp@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 18 April 2024

Nomor : 710/ 212 /413.111/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : **Laporan Pengelolaan Risiko
Triwulan I Tahun 2024 Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Lamongan**

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
Cq. Bpk. Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamongan
di-

LAMONGAN

Menindaklanjuti surat saudara Inspektur Kabupaten Lamongan tanggal 05 April 2024 Nomor : 710/272/413.201/2024 perihal Pemberitahuan Kegiatan Monitoring Manajemen Risiko, maka bersama dikirimkan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Triwulan I Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**



Drs. HAMDANI AZAHARI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651021 198602 1 003

Tembusan :

Yth. Sdr. Inspektur Kab. Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214

Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-Mail : dpmptsp@lamongankab.go.id

Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 710/ 212 /413.111/2024

TANGGAL : 18 April 2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  <u>SRI WINARTI, SE.MM.</u> NIP. 19800401 200312 2 006 Anggota
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan  <u>Ir. YAYUK SRI RAHAYU, ST.MT.</u> NIP. 19690428 200112 2 003 Koordinator
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan  <u>Drs. HAMDANI AZAHARI, MM.</u> NIP. 19651021 198602 1 003 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko Organisasi. Termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan penilaian hal-hal negatif yang dapat terjadi. Penerapan manajemen Risiko berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen. Proses atau fungsi manajemen risiko sering diterjemahkan dalam tiga langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen risiko diharapkan membuat organisasi menjadi sadar risiko dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Hasil yang diharapkan adalah keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko. Maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2024 tentang Struktur pengelolaan risiko Kabupaten Lamongan maka Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan manajemen Risiko untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan daerah kreatif berwawasan budaya dan keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi Terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
6. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2024 tentang Struktur pengelolaan risiko Kabupaten Lamongan

C. Maksud dan Tujuan

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

1.4 Ruang Lingkup

Manajemen risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- a. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- b. Identifikasi risiko ;
- c. Analisis risiko ;
- d. Evaluasi risiko ;
- e. Pengendalian risiko ;
- f. Pemantauan dan telaah ulang ;
- g. Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tribulan I

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun kegiatan- kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada tribulan I sebagaimana terlampir.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan I

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan - kegiatan pengendalian terhadap risiko – risiko yang dilaksanakan pada Tribulan I sebagaimana terlampir

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko antara lain Keterbatasan kapasitas ASN pengelola manajemen risiko sehingga menjadi penghambat dalam merumuskan rencana tindak pengendalian terhadap risiko yang ada

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum perlu dilakukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya, dari hasil capaian kinerja yang sudah terealisasi menandakan bahwa risiko sudah dapat di minimalisir dan sisa risiko dapat diselesaikan pada tribulan I. Sehingga Rencana tindak pengendalian yang sudah ada untuk terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana yang sudah di tentukan sampai dengan akhir tahun.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai upaya perbaikan. selain itu peranan unit pengendali risiko sangat penting dalam pengelolaan risiko di mulai dari identifikasi risiko, pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana tindak pengendalian dan pemantauan. sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja kami akan melakukan evaluasi dan review terhadap rencana tindak pengendalian secara terpadu serta peningkatan kapasitas SDM pengelola Risiko.

LAMPIRAN

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lamongan									
Tahun Penilaian : 2024									
Periode yang dinilai : 2024									
Tujuan Strategis : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan									
Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal									
OPD yang Dinilai : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lamongan									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
A	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Prosentase pertumbuhan ekonomi	Pengembangan Potensi Investasi Kurang Optimal	RSO.19.02.01.18	Bupati Lamongan	Kurangnya promosi investasi yang berdampak pada menurunnya minat investasi	Eksternal	UC	Prosentase pertumbuhan ekonomi rendah	Bupati Lamongan

1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	RSO.19.02.01.18		Pajak Daerah yang Tinggi	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi Investasi Rendah	Investor
		Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Regulasi dipandang masih rumit	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi Investasi Rendah	Investor
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Menurunnya Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata perizinan	Alur koordinasi yang terlalu panjang dari DPMP TSP ke perangkat daerah lain	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/ penerima layanan
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Presentase peningkatan minat investasi	Menurunnya jumlah investor PMA dan PMDN	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata kelola Penanaman modal	Kurangnya informasi potensi investasi di Kabupaten Lamongan	Eksternal	UC	Presentase minat investasi rendah	Investor

	Program Promosi Penanaman Modal	Presentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Menurunnya kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata kelola Penanaman modal	Anggaran yang tidak tersedia tidak sesuai ketentuan	Eksternal	UC	Menurunnya minat investasi karena informasi potensi investasi di Kabupaten Lamongan kurang dipromosikan	Investor
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Presentase pengendalian perusahaan yang berinvestasi	Menurunnya perusahaan yang melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata kelola Penanaman modal	Kurang pahamnya perusahaan akan kewajiban penyampain LKPM	Eksternal	UC	Pengendalian dan pengawasan perusahaan menjadi terhambat	Perusahaan/ Pelaku usaha
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM/SKM	Menurunnya Nilai IKM/SKM akibat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tidak dapat dilaksanakan dengan prima	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata perizinan	SDM pelayanan yang belum optimal	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/ penerima layanan
		Nilai SAKIP DPMPTSP	Menurunnya Nilai SAKIP DPMPTSP	RSO.19.02.04.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Kurangnya inovasi/perbaikan terkait manajemen kinerja	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah dan efektivitas pelayanan rendah	Pemohon/ penerima layanan

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan											
Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Lamongan											
Tahun Penilaian : 2024											
Periode yang dinilai : 2024											
Tujuan Strategis : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan											
Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Efektivitas Investasi dan Meningkatkan Pelayanan Perizinan											
Urusan Pemerintahan : Penanaman Modal											
OPD yang Dinilai : Pemerintah Kabupaten Lamongan											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Risiko	Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
a	b	c	d	e				Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
	PENANAMAN MODAL							h	i	k	l
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tidak	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan Evaluasi perangkat daerah kurang tepat	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Jaminan	Pertanggung jawaban	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	DPMPTSP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	Risiko Operasional Kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	Risiko Operasional Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Pertanggung jawaban	Risiko Operasional Kegiatan Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tidak sesuai	ROO.19.03.02.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya disiplin Pegawai	Internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Kegiatan	Pertanggung jawaban	Risiko Operasional Kegiatan Laporan pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi tidak sesuai	ROO.19.03.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Internal	C	pelaksanaan tidak sesuai dengan bidangnya	DPMPTSP
	Administrasian Umum Perangkat Daerah										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan peralatan rumah tangga tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan bahan logistik kantor tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPPTSP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpenuhi bahan bacaan	Internal	C	penyediaan bahan bacaan kurang tepat	DPMPPTSP
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan fasilitasi kunjungan tamu tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terjamin fasilitas tamu	Internal	C	penyediaan makan minum tamu kurang tepat	DPMPPTSP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pertanggung jawaban	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Internal	C	pelaksanaan tidak sesuai dengan bidangnya	DPMPPTSP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
Pengadaan Meubel	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan pengadaan Meubel tidak sesuai	ROO.19.03.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPPTSP

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan pengadaan peralatan dan mesin lainnya tidak tepat waktu	ROO.19.03.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPPTSP
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya Jasa	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyedia jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik tidak tepat waktu	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi jasa komunikasi, SDA dan listrik	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPPTSP
Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor kurang tepat	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi jasa sarana prasarana	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPPTSP
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Jasa	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyedia jasa pelayanan Umum Kantor kurang tepat	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Internal	C	penyediaan jasa pelayanan kurang tepat	DPMPPTSP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpeliharanya sarana prasarana	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPPTSP

	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan pelaksanaan pemberian fasilitas tidak tepat waktu	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	Berkas dokumentasi tidak lengkap	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPPTSP
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota										
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan peta potensi investasi tidak sesuai	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang koordinasi dengan Bappelitbangda	Internal	C	peta potensi tidak lengkap	DPMPPTSP
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi tidak sesuai	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata	Kurang sesuai pelaksanaan kegiatan promosi	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan promosi kurang tepat	DPMPPTSP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kertas Kerja Strategis OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama PendaPemerintah Kabupaten Lamongan

Nama OPDDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Penilaian2024

Periode yang Dinilai2024

Tujuan StrategisMengoptimalisasi Reformasi dan Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa

Urusan PemerintahanPenanaman Modal

OPD yang dinilaiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan Strategis PemerintahanMengoptimalisasi Reformasi dan Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa

SasaranMeningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah, Meningkatkan Pembedayaan Desa

No	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pinak yang Terkena	
1	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pajak Daerah Yang Tinggi	Eksternal	Prosentase Nilai Realisasi investasi rendah	Investor	Edit Hapus
2	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi dibanding masih rumit	Eksternal	Prosentase Nilai Realisasi investasi rendah	Investor	Edit Hapus
3	Prosentase Penyelesaian Prizinan Tepat waktu	Menurunnya Prosentase Penyelesaian Prizinan Tepat Waktu	RSO.19.02.01.18	Penata Perizinan	Alur koordinasi yan terlalu panjang dan DPMPPTSP ke Perangkat Daerah lain	Eksternal	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/Penerima layanan	Edit Hapus
4	Prosentase Peningkatan minat Investasi	Menurunnya Jumlah Investor PMA dan PMDN	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	Kurangnya informasi potensi investasi	Eksternal	Prosentase minat investasi rendah	Investor	Edit Hapus
5	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Menurunnya kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	Kurangnya kegiatan promosi	Eksternal	Menurunnya minat investasi karena informasi potensi investasi	Investor	Edit Hapus
6	Prosentase Pengendalian	Menurunnya Perusahaan yang melaporkan	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman	Kurang pahamnya perusahaan akan	Eksternal	Pengendalian dan	Perusahaan/ pelaku	Edit

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Penilaian

2024

Periode yang Dinilai

2024

Tujuan Strategis

Sasaran strategis OPD

Ususan Pemerintahan

Penanaman Modal

OPD yang Dinilai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab			Dampak			Action
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/J/C	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tertaksananya Kegiatan	Perencanaan	Laporan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappeditbangda	internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPPTSP	Edit Hapus
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Kegiatan	Perencanaan	Laporan Evaluasi perangkat daerah kurang tepat	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappeditbangda	internal	C	Evaluasi Perangkat daerah kurang tepat	DPMPPTSP	Edit Hapus
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Jaminan	Pertanggung jawaban	Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Penyayaran tidak dapat segera direalisasikan	DPMPPTSP	Edit Hapus